

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana penting untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara umum, kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan selama ini mempunyai ketimpangan yang tinggi terhadap infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan, sebagai bentuk komitmen dalam memajukan semua desa. Khususnya daerah-daerah tertinggal terus dilakukan percepatan pembangunan, agar segera terjadi pemerataan (Sulistiyani dan Muthaher, 2019). Upaya dorongan Pemerintah Pusat terlihat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sejak tahun 2015 telah memfasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan di setiap provinsi melalui dana desa (Sentinuwo dkk., 2018).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Besaran dana desa masing masing akan bervariasi sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota (Raharjo, 2020). Pemerintah tentu mengharapkan hasil pembangunan infrastruktur perdesaan dapat berdampak pada akselerasi kemajuan desa.

Salah satu upaya untuk dapat menelaah sejauh mana dana desa dapat memberikan manfaat ke masyarakat desa adalah dengan mengkaji status desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Status desa diklasifikasi atas 5 tingkatan yaitu desa sangat tertinggal dengan $IDM < 0,491$, desa tertinggal dengan $IDM > 0,491-0,599$, desa berkembang dengan $IDM > 0,599-0,707$, desa maju dengan

IDM > 0,707–0,815, dan desa mandiri dengan IDM > 0,815 (Sukiyono dkk., 2019). Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, setidaknya terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika status desa semakin menurun. Misalnya dari status desa berkembang akan menjadi desa tertinggal atau desa sangat tertinggal (Irmayani dkk., 2021).

Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya untuk mengakselerasi kemajuan desa dalam 4 kecamatan wilayah administrasinya. Pada Tahun 2022, hampir seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe memiliki status desa rata-rata maju. Adapun kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banda Sakti dengan IDM 0,791, Kecamatan Muara Satu dengan IDM 0,772, dan Kecamatan Muara Dua dengan IDM 0,740. Sementara 1 kecamatan lainnya masih memiliki status desa rata-rata berkembang yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan IDM 0,697. Sehubungan Kecamatan Blang Mangat memiliki nilai IDM terendah dengan status desa berkembang, maka Kecamatan Blang Mangat ditetapkan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Kecamatan Blang Mangat terdapat beberapa permasalahan yang penulis peroleh dari hasil pengamatan. Permasalahan pertama adalah pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Blang Mangat masih rendah. Hal tersebut terlihat dari masih banyak Perangkat Desa yang belum mampu memahami perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan cara mengawasi pekerjaan berdasarkan bobot kumulatif pekerjaan. Idealnya Perangkat Desa yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur perdesaan, sudah mampu memahami hal tersebut. Permasalahan berikutnya adalah berdasarkan pengamatan penulis, kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Blang Mangat juga masih rendah. Hal tersebut terlihat dari masih banyak Pemerintah Desa yang belum menyampaikan penggunaan dana desa secara transparan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan melalui papan pengumuman, radio informasi, dan media informasi lainnya. Idealnya setiap Pemerintah Desa harus bersikap transparan atas

kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Baik dan buruknya pemahaman Perangkat Desa dan kinerja Pemerintah Desa, selanjutnya dapat mempengaruhi nilai indeks kepuasan Kepala Desa dan penerima manfaat terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Blang Mangat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan?
2. Bagaimanakah kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan?
3. Berapakah nilai indeks kepuasan Kepala Desa terhadap pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan?
4. Berapakah nilai indeks kepuasan penduduk desa dan Ketua BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. Mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.
3. Mengetahui nilai indeks kepuasan Kepala Desa terhadap pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Mengetahui nilai indeks kepuasan penduduk desa dan Ketua BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait hasil evaluasi pemahaman Perangkat Desa dalam

pembangunan infrastruktur perdesaan, evaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, nilai indeks kepuasan Kepala Desa terhadap pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, dan nilai indeks kepuasan penduduk desa dan Ketua BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.

2. Manfaat akademis dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan evaluasi pemahaman Perangkat Desa dan kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan pada suatu kawasan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Blang Mangat sebagai lokasi penelitian ditinjau seluruh desa yang meliputi 22 desa yaitu Desa Alue Lim, Blang Buloh, Mane Kareung, Asan Kareung, Rayeuk Kareung, Kumbang Punteut, Blang Punteut, Ulee Blang Mane, Keude Punteut, Mesjid Punteut, Tunong, Baloy, Teungoh, Blang Teue, Jambo Timu, Mesjid Meuraksa, Blang Cut, Kuala Meuraksa, Jeuleukat, Blang Weu Panjou, Blang Weu Baroh, dan Seuneubok.
2. Perangkat Desa ditujukan kepada yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dan Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan.
3. Evaluasi pemahaman Perangkat Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan meliputi 9 indikator.
4. Pemahaman Perangkat Desa dianalisis menurut persepsi Kepala Desa di Kecamatan Blang Mangat.
5. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan meliputi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, serta aspek pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi 10 indikator.
6. Kinerja Pemerintah Desa dianalisis menurut persepsi penduduk desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Blang Mangat.

7. Kriteria responden dari penduduk desa adalah berumur > 30 tahun, pendidikan terakhir minimal SMA, dan menaruh perhatian terhadap pengelolaan dana desa.
8. Evaluasi pemahaman Perangkat Desa dan Pemerintah Desa dianalisis terhadap periode terakhir pemerintahan Kepala Desa, yang telah mempunyai kinerja dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif melalui kuesioner.
2. Sampel responden uji instrumen untuk evaluasi pemahaman Perangkat Desa ditetapkan sebanyak 30 responden, yang ditujukan kepada pihak Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Seksi Kesejahteraan.
3. Sampel responden uji instrumen untuk evaluasi kinerja Pemerintah Desa ditetapkan sebanyak 30 responden, yang ditujukan kepada penduduk desa di Kecamatan Blang Mangat.
4. Sampel penelitian untuk evaluasi pemahaman Perangkat Desa sebanyak 22 Kepala Desa.
5. Sampel penelitian untuk evaluasi kinerja Pemerintah Desa melalui penggunaan rumus Slovin dengan *error level* 5% diperoleh sebanyak 395 penduduk desa dan ditambah Ketua BPD dari 22 desa, sehingga total sampel penelitian diperoleh sebanyak 417 responden.
6. Teknik *sampling* untuk mengevaluasi pemahaman Perangkat Desa digunakan *sampling* jenuh.
7. Teknik *sampling* untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa digunakan *proportionate stratified random sampling* dan *purposive sampling*.
8. Teknik analisis data digunakan statistik deskriptif melalui *software Statistics Product and Service Solution* (SPSS) versi 27, *Importance Performance Analysis* (IPA) melalui *software* Minitab versi 19, dan *Customer Satisfaction Index* (CSI).